

Dampak Sosial dari Krisis di Indonesia:

Hasil dari Survey Nasional Kecamatan

Sudarno Sumarto, Anna Wetterberg, dan Lant Pritchett*

Abstrak: Makalah ini ditulis berdasarkan hasil-hasil survey kualitatif yang dilakukan terhadap tiga orang ahli di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Survey ini dirancang untuk memperoleh gambaran secara cepat dan menyeluruh mengenai dampak krisis yang terjadi di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencakup berbagai jenis dampak (migrasi, akses terhadap sarana kesehatan dan pendidikan, ketersediaan pangan), frekuensi penggunaan berbagai jenis kiat penanggulangan (penjualan aset, pengurangan frekuensi makan, dan lain-lain), dan dampak terbesar yang dialami oleh masing-masing daerah. Kemudian disusun beberapa indeks untuk mengukur dampak krisis yang mencakup lima segi.

Terdapat tiga temuan utama. *Pertama*, dampak krisis di daerah perkotaan lebih parah dibandingkan dengan daerah pedesaan. *Kedua*, dampak krisis ini sangat heterogen, dimana terdapat beberapa daerah yang mengalami kesulitan parah sementara daerah-daerah lain relatif baik keadannya. Tetapi di pulau Jawa baik daerah pedesaan maupun perkotaan sama-sama mengalami dampak yang parah. Beberapa daerah di pulau-pulau lain, khususnya sebagian besar Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, mengalami dampak krisis yang tidak terlalu besar. Ada juga daerah-daerah yang memperlihatkan keadaan yang memburuk, namun tidak jelas apakah ini merupakan dampak dari krisis ekonomi ataukah akibat dari musim kemarau (Timor Timur, NTT, NTB) dan kebakaran (Kalimantan Timur). *Ketiga*, terdapat kaitan yang kecil antara tingkat kemiskinan awal dengan derajat besarnya dampak krisis, dimana terdapat beberapa daerah yang relatif miskin yang ternyata tidak begitu terkena krisis sementara terdapat beberapa daerah lain yang lebih makmur yang ternyata mengalami dampak krisis yang besar. Implikasi dari hal ini adalah bahwa sasaran dari *program penanganan krisis* dan sasaran dari *program pengentasan kemiskinan* merupakan dua hal yang sangat berbeda.

Konsistensi dari hasil survey ini dengan hasil penelitian-penelitian lain yang bersifat kuantitatif menunjukkan bahwa suatu instrumen kualitatif dengan jangka waktu pelaksanaan yang singkat seperti yang digunakan dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran yang baik mengenai derajat dampak krisis di berbagai daerah dan kecenderungan dari keseluruhan perubahan yang mereka alami. Meskipun hasil penelitian ini memerlukan pengesahan lebih jauh serta pemeriksaan silang untuk dapat digunakan dalam perancangan program-program penanganan krisis, survey jenis ini mampu mengarahkan upaya-upaya penanganan krisis ke arah yang benar. Karena biayanya rendah dan jangka waktunya singkat, survey sejenis dapat diulang setelah enam bulan sebagai suatu usaha untuk melakukan pemantauan berlanjut dari dampak krisis ini.

* Bantuan dari Ford Foundation dan ASEM Trust Fund sangat dihargai. Para penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu merancang daftar pertanyaan, termasuk Scott Guggenheim, Sarah Cliffe, Brigitte Duces, Steven Burgess, dan Syaikh Usman. Pengumpulan data dilakukan oleh BPS dan analisisnya dilakukan oleh Peter Gardiner dan tim-nya dari INSAN HITAWASANA SEJAHTERA. Penemuan dan kesimpulan yang tertulis dalam artikel ini seluruhnya dari para penulis dan belum tentu mewakili pandangan dari Bank Dunia, para Direktur Eksekutifnya, ataupun negara-negara yang mereka wakili.

Dampak Sosial dari Krisis di Indonesia: Hasil dari Survey Nasional Kecamatan

- I. Latar Belakang
- II. Survey dan Metoda
- III. Analisis Propinsi dan Kabupaten
- IV. Dampak-dampak Khusus dari Krisis
- V. Kesimpulan

Lampiran 1: Rincian Survey

Lampiran 2: Reliabilitas Antar-Responden

Lampiran 3: Penyusunan Indeks

Lampiran 4: Indikator-indikator Survey

I. Latar Belakang

Semejak krisis ekonomi dan politik di Indonesia semakin memburuk selama setahun belakangan ini, terdapat peningkatan pengakuan akan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menelusuri masalah-masalah yang timbul, yaitu dengan tujuan agar dapat dirancang jawaban-jawaban secara tepat. Usaha-usaha untuk memantau dampak sosial dari krisis selama ini terkonsentrasi pada perbaikan atau percepatan alat-alat yang ada, seperti survey sosial ekonomi nasional (SUSENAS) dan survey potensi desa (PODES). Meskipun usaha-usaha ini penting untuk jangka waktu menengah, tetapi waktu yang diperlukan untuk perancangan instrumen, pengumpulan, dan pengolahan data adalah terlalu panjang untuk dapat membuat alat-alat ini berguna sebagai petunjuk dalam pengambilan tindakan yang segera. Pada saat data diolah dan dianalisis, keadaan yang berubah dengan cepat menjadikan data tersebut tidak sesuai lagi.

Survey-survey lain terfokus pada pengukuran dampak untuk sektor-sektor tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan, dan telah menghasilkan informasi rinci yang baik untuk sejumlah kecil wilayah serta indikasi mengenai kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada sektor-sektor ini. Akan tetapi, survey-survey ini tidak dirancang untuk membandingkan dampak krisis di seluruh Indonesia dan mengidentifikasi daerah-daerah dimana pengaruh-pengaruh dampak krisis secara keseluruhan telah paling parah.

Untuk mendapatkan gambaran ringkas mengenai perubahan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan dan masalah-masalah yang timbul di seluruh Indonesia, Ford Foundation dan Bank Dunia merancang suatu survey berjangka waktu singkat yang dilaksanakan di semua kecamatan. Tujuan dari survey ini adalah untuk memperoleh indikasi awal dari dampak krisis secara keseluruhan, perbedaan tingkat keparahan dari berbagai masalah di berbagai bagian dari Indonesia, dan petunjuk mengenai bagaimana cara mencapai sasaran program penanggulangan krisis yang paling efektif.

II. Survey dan Metoda

Penelaahan Cepat Kemiskinan Tingkat Kecamatan (*Kecamatan Rapid Poverty Assessment*) adalah suatu survey subjective terhadap responden ahli dari tiga orang petugas di setiap kecamatan yang berjumlah 4025 di seluruh Indonesia. Pada setiap kecamatan, tiga orang petugas yang lingkup tugasnya mencakup seluruh kecamatan dipilih sebagai responden: mantri tani di daerah pedesaan atau kepala seksi PMD di daerah perkotaan; penilik sekolah; dan dokter puskesmas. Setiap responden diminta untuk menjawab satu set pertanyaan umum mengenai

perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat kecamatan secara keseluruhan dan satu set pertanyaan yang berkaitan dengan tugas khusus mereka.¹

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mencakup derajat berbagai jenis dampak krisis (migrasi, akses terhadap sarana kesehatan dan pendidikan, ketersediaan pangan, dan lain-lain), frekuensi penggunaan berbagai kiat penanggulangan, dan dampak terbesar yang dialami setiap daerah. Semua pertanyaan dirancang untuk mengukur proporsi perubahan pada berbagai indikator dibandingkan terhadap waktu yang relatif pada tahun 1997 untuk menghilangkan pengaruh musiman. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap ketiga responden bersifat kualitatif dan mereka diminta untuk mengukur derajat perubahan setiap indikator dengan menggunakan satu dari lima skala: 1) agak membaik; 2) kurang lebih sama; 3) agak memburuk; 4) lebih buruk; 5) jauh lebih buruk². Set pertanyaan umum juga mencakup satu pertanyaan untuk meranking berbagai permasalahan yang dihadapi dan tiga pertanyaan mengenai program-program penanganan krisis yang telah ada. Set pertanyaan khusus juga umumnya bersifat kualitatif, namun terdapat sejumlah pertanyaan yang bersifat kuantitatif (yang mengulangi pertanyaan kualitatif).

Setiap pendekatan memiliki kelemahan, tidak terkecuali dengan pertanyaan-pertanyaan kualitatif yang bersifat subjektif. Dengan keputusan untuk menggunakan instrumen jenis ini, hilangnya ketelitian kuantitatif dan ketergantungan terhadap sejumlah kecil responden di setiap wilayah merupakan harga yang harus dibayar bagi suatu survey cepat dan menyeluruh secara nasional. Bagi survey ini, cakupan nasional diperlukan guna mengidentifikasi daerah-daerah yang terkena krisis untuk penentuan sasaran program penanggulangannya. Survey kuantitatif yang menggunakan pendekatan pemilihan sampel yang mewakili tidak dilakukan karena jumlah sampel yang diperlukan untuk dapat mewakili di tingkat kecamatan adalah terlalu besar. Dengan menanyakan penilaian-penilaian kualitatif, diharapkan untuk mendapatkan cakupan menyeluruh dan lengkap (penggunaan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif meningkatkan secara dramatis jumlah responden yang tidak menjawab dalam survey ini). Juga penting untuk membatasi jumlah responden di setiap kecamatan untuk meminimalkan waktu antara penyebaran daftar pertanyaan dengan pengembaliannya.

Reliabilitas antar-responden. Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pendekatan kualitatif dengan responden ahli reliabilitas antar-responden. Secara

¹ Disamping ketiga orang responden tersebut, di setiap kecamatan mantri statistik diminta melengkapi sebuah daftar pertanyaan yang berbeda, termasuk di dalamnya pertanyaan-pertanyaan kuantitatif mengenai perubahan-perubahan yang terjadi semenjak dimulainya krisis. Lihat lampiran 1 untuk rincian rancangan survey dan pengumpulan data.

sedehana, apakah dua orang yang diberikan pertanyaan yang sama mengenai kecamatan yang sama akan memberikan jawaban yang sama? Karena 21 pertanyaan pada survey ini adalah pertanyaan umum yang harus dijawab oleh ketiga responden, reliabilitas antar-responden dapat diuji dengan membandingkan jawaban-jawaban mereka. Lampiran 2 memberikan rincian hasil dari tiga ukuran yang berbeda: korelasi antar responden yang berbeda; analisis sidik ragam dalam dan antar kecamatan; dan rata-rata penyimpangan absolut.

Ketiga pendekatan menunjukkan tingkatan yang dapat diterima atas pola jawaban yang konsisten dalam kecamatan, tetapi juga menunjukkan bahwa terdapat tingkatan yang nyata dalam saling ketidaksetujuan antara responden. Korelasi antar kecamatan untuk jawaban dari setiap dua orang responden dari kecamatan yang sama jarang melebihi 0.3 dan dalam beberapa hal lebih mendekati ke 0.2. Rata-rata absolut ketidaksetujuan antara dua responden di kecamatan yang sama (pada skala 1 sampai 5) adalah antara 0.6 dan 0.8. Walaupun ketidaksetujuan ini relatif kecil secara absolut, keragaman total dari berbagai jawaban juga cukup kecil (deviasi standar bervariasi antara 0.9 dan 1.2). Jumlah kuadrat dalam kecamatan (yang merupakan bagian dari keragaman data yang muncul dari ketidaksetujuan antar responden di daerah yang sama) umumnya sekitar sepertiga atau setengah dari keragaman total³.

Tingkat ketidakpastian ini berguna sebagai peringatan untuk membatasi analisis kepada perbandingan-perbandingan yang secara realistis diharapkan bahwa “tanda-tanda (*signal*)” lebih nyata daripada “kegaduhan (*noise*)”. Ini berarti bahwa analisis harus dilakukan pada gabungan kecamatan (yaitu kabupaten dan kotamadya atau propinsi) dan gabungan dari variabel-variabel. Juga perbedaan besar antar kecamatan cukup reliabel tetapi perbedaan kecil (misalnya antara “kira-kira sama” dan “agak memburuk”) harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Implikasi dari keterbatasan-keterbatasan ini adalah bahwa walaupun pola umum yang diindikasikan oleh data ini berguna dalam penentuan sasaran program penanggulangan krisis, data ini tidak dapat digunakan sendirian dalam menentukan sasaran program di tingkat kecamatan.

Penyusunan indeks. Terdapat banyak pertanyaan dalam survey ini sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan analisis rinci dari setiap pertanyaan. Oleh karena itu, disusunlah indeks-indeks ringkasan dari kombinasi berbagai indikator untuk kelima dimensi krisis. Penyusunan setiap indeks dampak krisis melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:

² Contoh pertanyaan adalah “Dibandingkan dengan waktu yang kira-kira sama pada tahun yang lalu, berapa banyak keluarga yang mengubah makanan pokok ke makanan pengganti yang lebih rendah kualitasnya”. Jawab dengan salah satu pilihan yang diberikan.

³ Karena pertanyaan khusus hanya ditanyakan pada satu responden di setiap kecamatan, uji yang sama tidak dapat dilakukan untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Akan tetapi, dapat diharapkan bahwa jawaban kualitatif untuk pertanyaan-pertanyaan ini juga dihadapkan pada masalah ketidaktepatan yang sama.

- a) memilih variabel-variabel dengan reliabilitas internal yang memadai dan kemudian menentukan jawaban tunggal dari setiap kecamatan;⁴
- b) membagi variabel-variabel yang memiliki reliabilitas internal tersebut ke dalam lima kategori dimensi krisis: 1) penggunaan kiat penanggulangan sebagai jawaban terhadap dampak krisis; 2) ketahanan pangan; 3) ketenagakerjaan; 4) pendidikan; 5) kesehatan; dan
- c) menetapkan bobot yang tepat untuk variabel-variabel yang terpilih dalam setiap kategori.

Dengan menggunakan variabel-variabel terpilih pada tiap kategori, teknik “komponen utama (*principal components*)” diterapkan untuk memperoleh “tanda-tanda” yang terkandung dalam satu set variabel yang terpilih dalam setiap kategori. Komponen utama pertama dari masing-masing set variabel dalam setiap kategori, yaitu suatu kombinasi linier dari semua variabel yang mewakili keragaman yang paling umum dari semua variabel, digunakan sebagai indeks dampak krisis untuk setiap kategori.

Variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam analisis “komponen utama” untuk masing-masing indeks adalah⁵:

* **Kiat Penanggulangan:** Ada sepuluh pertanyaan mengenai kiat penanggulangan dan berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti perubahan dalam penjualan hewan atau barang-barang tahan lama dan perubahan dalam partisipasi dan kontribusi di arisan dan kegiatan-kegiatan upacara.

* **Ketahanan Pangan:** Indeks ini mengkombinasikan sembilan pertanyaan mengenai ketahanan pangan, termasuk penduduk yang mengurangi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, penduduk yang tidak dapat mampu membeli bahan makanan pokok, dan indikasi-indikasi kekurangan gizi.

* **Ketenagakerjaan:** Indeks ini mengkombinasikan tujuh variabel mengenai proporsi orang yang menambah jam kerja, jumlah anggota keluarga yang bekerja, migrasi baik laki-laki maupun perempuan, dan kondisi usaha lokal.

* **Pendidikan:** Indeks pendidikan mengkombinasikan sembilan pertanyaan dari penilik sekolah mengenai jumlah murid yang terdaftar dan yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar, dan mengenai sumbangan pembayaran pendidikan serta kehadiran guru.

⁴ Untuk dua puluh satu pertanyaan dengan tiga responden, jawaban untuk setiap kecamatan dikombinasikan ke dalam satu nilai tunggal. Aturan yang digunakan untuk menentukan nilai tunggal untuk setiap kecamatan adalah: a) jika ketiga responden memberikan jawaban yang sama, maka jawaban/nilai itulah yang digunakan; b) jika dua responden memberikan jawaban yang sama, maka jawaban/nilai itulah yang digunakan; dan c) jika ketiga responden memberikan jawaban yang berbeda, maka digunakan median dari ketiga jawaban/nilai tersebut.

* **Kesehatan:** Tujuh pertanyaan yang diajukan kepada dokter puskesmas, yaitu mengenai kunjungan pasien, kemampuan pembelian obat-obatan, ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kontrasepsi, dan kualitas pelayanan, semuanya digunakan dalam penyusunan indeks kesehatan. Indeks ini adalah yang paling mengecewakan karena komponen umum dari jawaban-jawaban yang diberikan terlalu kecil untuk membuat indeks ini memiliki nilai tambah dibandingkan dengan masing-masing pertanyaan. Karena alasan ini maka peta dampak krisis di bidang kesehatan tidak dibuat.

III. Analisis Propinsi dan Kabupaten: Heterogenitas antar Wilayah dan Perbedaan Desa-Kota

Indeks-indeks yang telah disusun digunakan untuk dua tingkat analisis; pertama pada tingkat propinsi dengan membedakan daerah perkotaan dan pedesaan, dan kedua pada tingkat kabupaten dengan membedakan antara kabupaten dan kotamadya. Terdapat tiga kesimpulan yang muncul dengan sangat jelas dari kedua tingkat analisis ini:

- 1) Daerah perkotaan mengalami dampak krisis yang jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah pedesaan;
- 2) Terdapat heterogenitas yang sangat tajam dari dampak krisis, dimana beberapa daerah sangat parah keadaannya sedangkan beberapa daerah lain justru membaik keadaannya. Tiga pola utama yang muncul adalah:
 - Pulau Jawa sangat terkena, bahkan di daerah pedesaannya, yang sangat mungkin disebabkan oleh tingginya tingkat integrasi antara daerah perkotaan dan pedesaan;
 - Beberapa pulau lain, terutama sebagian besar Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, mengalami dampak negatif dari krisis yang minimal;
 - Beberapa daerah lain juga menunjukkan dampak negatif, namun tidak jelas apakah masalah-masalah yang timbul disebabkan oleh krisis ekonomi ataukah akibat dari musim kemarau (Timor Timur, NTT, NTB) dan kebakaran hutan (Kalimantan Timur).
- 3) Terdapat hubungan yang kecil antara tingkat kemiskinan awal dengan besarnya dampak krisis, dimana beberapa daerah yang terkena dampak krisis yang sangat parah adalah daerah-daerah yang tadinya relatif makmur dan memiliki sektor ekonomi modern yang berkembang pesat.

⁵ Untuk pertanyaan-pertanyaan khusus dan bobot (*factor loading*) yang digunakan, lihat Tabel-tabel 8a-e.

A. *Analisis Propinsi*

Di setiap propinsi, nilai-nilai untuk kecamatan perkotaan dan pedesaan semuanya digabungkan secara terpisah. Dengan demikian dihasilkan 51 wilayah (masing-masing dua wilayah di 25 propinsi⁶ dan satu untuk DKI Jakarta karena tidak memiliki kecamatan pedesaan). Kemudian semua wilayah ini diurutkan menurut tingkat dampak (lihat Tabel 1).

Urutan untuk kelima indeks diperlihatkan di Tabel 1. Daerah perkotaan dan pedesaan di propinsi yang sama dibedakan dengan jenis tulisan (misalnya “Kaltim” ditulis dengan huruf tebal adalah Kalimantan Timur wilayah perkotaan, sementara untuk wilayah pedesaannya ditulis dengan huruf miring). Wilayah-wilayah ini juga diurutkan menurut indeks dampak keseluruhan yang dihitung berdasarkan rata-rata urutan dari tiga indeks (ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan kiat penanggulangan).

Berdasarkan indeks dampak krisis rata-rata, wilayah yang terkena dampak krisis terparah adalah wilayah perkotaan Kalimantan Timur, sementara wilayah yang paling tidak terkena dampak adalah wilayah perkotaan Bengkulu. Dari membandingkan 40% wilayah yang paling terkena dampak krisis dengan 40% wilayah yang paling sedikit terkena dampak, tampak dengan sangat jelas bahwa wilayah perkotaan, secara rata-rata, terkena dampak yang jauh lebih parah daripada wilayah pedesaan. Dari 20 wilayah yang paling terkena dampak krisis, 14 diantaranya adalah wilayah perkotaan. Sementara itu, dari 20 wilayah yang paling sedikit terkena dampak, 13 diantaranya adalah wilayah pedesaan. Juga tampak jelas bahwa semua wilayah di pulau Jawa, baik wilayah perkotaan maupun pedesaannya, termasuk ke dalam 20 daerah yang sangat terkena dampak krisis. Daerah-daerah lain yang baik wilayah perkotaan maupun pedesaannya termasuk ke dalam 20 daerah yang sangat terkena dampak adalah Kalimantan Timur dan Aceh.

Wilayah perkotaan yang termasuk ke dalam 40% wilayah yang paling sedikit terkena dampak krisis berada di propinsi-propinsi yang wilayah pedesaannya juga relatif tidak terpengaruh oleh krisis seperti Jambi, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Bengkulu.

⁶ Irian Jaya tidak dimasukkan ke dalam analisis karena sedikitnya jawaban yang masuk dari kecamatan-kecamatan di propinsi ini.

Tabel 1. Indeks Dampak Krisis Berdasarkan Propinsi dan Wilayah Pedesaan/Perkotaan

| Urutan | Dampak Keseluruhan* | Ketahanan Pangan | Kiat Penanggulangan | Ketenagakerjaan | Pendidikan | Kesehatan |
|--------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Kaltim | Timtim | DI Aceh | NTB | Kalbar | DI Yogya |
| 2 | NTT | NTT | Kaltim | Lampung | Timtim | Bali |
| 3 | DI Aceh | <i>Timtim</i> | Kalsel | Sumut | NTT | Kalbar |
| 4 | NTB | <i>NTT</i> | <i>Jabar</i> | Kaltim | <i>DI Aceh</i> | Lampung |
| 5 | Kalsel | NTB | lampung | Sumsel | <i>Kalbar</i> | Timtim |
| 6 | <i>Jabar</i> | DI Yogya | NTT | Jateng | Sumut | Jambi |
| 7 | DI Yogya | DI Aceh | Jabar | <i>Jabar</i> | <i>Timtim</i> | <i>DI Yogya</i> |
| 8 | Lampung | Kaltim | Kalbar | <i>Jateng</i> | DI Aceh | <i>Lampung</i> |
| 9 | Kalbar | <i>DI Yogya</i> | NTB | DI Yogya | <i>Sumut</i> | NTB |
| 10 | Jabar | Kalbar | Kalteng | Kalsel | <i>Kaltim</i> | <i>Bali</i> |
| 11 | Timtim | Jatim | Sumbar | Jabar | <i>Sultra</i> | <i>Jabar</i> |
| 12 | <i>Jateng</i> | <i>Jateng</i> | <i>DI Aceh</i> | NTT | | <i>DI Aceh</i> |
| 13 | Sumut | <i>Kaltim</i> | DKI Jakarta | <i>NTB</i> | Riau | <i>Jateng</i> |
| 14 | Jateng | <i>Jatim</i> | Sumut | DI Aceh | DKI Jakarta | Sultra |
| 15 | Jatim | Kalsel | DI Yogya | <i>DI Yogya</i> | <i>Kalteng</i> | Kaltim |
| 16 | <i>Kaltim</i> | <i>Jabar</i> | <i>Kaltim</i> | Jatim | <i>DI Yogya</i> | Sumut |
| 17 | <i>DI Yogya</i> | Jateng | <i>Jateng</i> | <i>DI Aceh</i> | <i>Kalsel</i> | Jabar |
| 18 | <i>DI Aceh</i> | Jabar | Jateng | <i>Jatim</i> | Jabar | Jatim |
| 19 | DKI Jakarta | Lampung | Timtim | <i>Lampung</i> | <i>Riau</i> | <i>Kalbar</i> |
| 20 | <i>Jatim</i> | <i>NTB</i> | <i>Kalteng</i> | Kalteng | <i>Jateng</i> | <i>NTB</i> |
| 21 | Sumbar | Sulsel | <i>Kalsel</i> | Riau | <i>Bengkulu</i> | <i>Sumut</i> |
| 22 | <i>NTT</i> | Sumut | Jatim | <i>Sumut</i> | <i>Bali</i> | <i>Kalteng</i> |
| 23 | <i>NTB</i> | <i>Lampung</i> | Riau | DKI Jakarta | Sumbar | <i>Maluku</i> |
| 24 | <i>Timtim</i> | DKI Jakarta | Sultra | Sulsel | Jateng | Riau |
| 25 | Kalteng | <i>DI Aceh</i> | Jambi | <i>Sumsel</i> | Jambi | Sulut |
| 26 | Sulsel | Sultra | <i>NTB</i> | Sumbar | <i>NTB</i> | <i>Sumbar</i> |
| 27 | <i>Kalteng</i> | <i>Sultra</i> | <i>Jatim</i> | Timtim | <i>Lampung</i> | <i>Sulteng</i> |
| 28 | <i>Lampung</i> | <i>Bali</i> | <i>DI Yogya</i> | Kalbar | <i>Sumsel</i> | <i>Sumsel</i> |
| 29 | <i>Kalsel</i> | <i>Kalteng</i> | <i>Sumbar</i> | Bali | <i>Sumsel</i> | DKI Jakarta |
| 30 | Sultra | Sumbar | Sulsel | <i>Sumbar</i> | <i>Jabar</i> | <i>Sulsel</i> |
| 31 | Riau | <i>Maluku</i> | Sulteng | <i>Kalteng</i> | <i>Sumbar</i> | <i>Kalsel</i> |
| 32 | Jambi | <i>Kalsel</i> | <i>NTT</i> | <i>Bali</i> | <i>Jamni</i> | <i>Jatim</i> |
| 33 | Sumsel | Bali | Sumsel | <i>Kalsel</i> | Jatim | Sulteng |
| 34 | <i>Sultra</i> | <i>Kalbar</i> | <i>lampung</i> | <i>Kaltim</i> | Sulut | <i>Bengkulu</i> |
| 35 | <i>Kalbar</i> | Sulut | <i>Kalbar</i> | Jambi | Kalsel | <i>Sultra</i> |
| 36 | <i>Sumbar</i> | Jambi | <i>Timtim</i> | <i>Kalbar</i> | DI Yogya | DI Aceh |
| 37 | <i>Sumut</i> | Riau | <i>Sumut</i> | <i>Sulsel</i> | <i>Sulsel</i> | Sulsel |
| 38 | <i>Bali</i> | <i>Sulsel</i> | <i>Sulsel</i> | <i>Sulut</i> | Lampung | jateng |
| 39 | Bali | Kalteng | <i>Sultra</i> | <i>Bengkulu</i> | Sulteng | Maluku |
| 40 | <i>Sulsel</i> | <i>Sumut</i> | Sulut | <i>Sultra</i> | Kalteng | Bengkulu |
| 41 | Sulut | Sumsel | <i>Sumsel</i> | <i>NTT</i> | Sultra | <i>Kaltim</i> |
| 42 | Sulteng | <i>Sulteng</i> | <i>Riau</i> | Sultra | <i>Sulteng</i> | Sumbar |
| 43 | <i>Maluku</i> | <i>Bengkulu</i> | <i>Sulteng</i> | Bengkulu | Sulsel | <i>Sulut</i> |
| 44 | <i>Sumsel</i> | Sulteng | <i>Jambi</i> | <i>Riau</i> | <i>Maluku</i> | <i>NTT</i> |
| 45 | <i>Sulteng</i> | <i>Sumbar</i> | Bali | <i>Timtim</i> | <i>Jatim</i> | <i>Riau</i> |
| 46 | <i>Bengkulu</i> | <i>Sumsel</i> | <i>Bengkulu</i> | <i>Sulteng</i> | NTB | <i>Jambi</i> |
| 47 | <i>Riau</i> | Maluku | <i>Bali</i> | <i>Jambi</i> | Kaltim | NTT |
| 48 | <i>Jambi</i> | <i>Riau</i> | <i>Maluku</i> | <i>Maluku</i> | <i>Sulut</i> | Sumsel |
| 49 | <i>Sulut</i> | <i>Jambi</i> | <i>Sulut</i> | Sulut | Bali | Kalsel |
| 50 | Maluku | <i>Sulut</i> | Bengkulu | Sulteng | Bengkulu | <i>Timtim</i> |
| 51 | Bengkulu | Bengkulu | Maluku | Maluku | Maluku | Kalteng |

*) Berdasarkan atas rata-rata tiga indeks (ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan kiat penanggulangan)

Catatan: Daerah perkotaan ditulis dengan cetakan tebal dan daerah pedesaan dengan cetakan miring.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dampak krisis terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan dan di pulau Jawa. Beberapa propinsi di belahan timur juga mengalami dampak negatif yang cukup besar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Perkecualian penting adalah wilayah perkotaan di propinsi-propinsi yang menghasilkan tanaman ekspor atau penghasil devisa lainnya (seperti pariwisata). Faktor-faktor yang mungkin menjelaskan pola wilayah seperti ini adalah integrasi yang cukup mendalam antara wilayah pedesaan dan perkotaan di pulau Jawa, sehingga suatu krisis yang berawal dari sektor modern (misalnya sektor perbankan dan perusahaan-perusahaan besar) akan ikut berpengaruh di pedesaan, musim kemarau yang baru saja terjadi di Indonesia bagian timur, dan meningkatnya pendapatan dalam rupiah (karena turunnya nilai rupiah) yang diperoleh dari ekspor hasil panen di daerah-daerah yang terhindar dari bencana musim kemarau yang baru saja terjadi.

Karena analisis komponen utama menghasilkan angka-angka indeks yang dinormalkan (untuk mendapatkan nilai rata-rata sama dengan nol) dan merupakan suatu gabungan yang kompleks dari berbagai macam indikator, maka sulit untuk membuat pernyataan-pernyataan mengenai perubahan absolut. Walaupun dapat diidentifikasi daerah-daerah mana “yang paling sedikit terkena dampak krisis”, tetapi sulit untuk mengatakan apakah ini berarti bahwa daerah-daerah tersebut secara absolut lebih baik keadaannya dari setahun yang lalu ataukah bahwa standar hidup di daerah-daerah ini juga telah menurun, tetapi penurunannya lebih kecil daripada daerah-daerah lain. Akan tetapi, tabulasi silang dari beberapa pertanyaan khusus menunjukkan bahwa beberapa daerah memang secara absolut membaik keadaannya dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Tabel 2 menampilkan “perubahan jumlah penduduk yang menjual barang-barang rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok”, dirinci menurut propinsi dan wilayah pedesaan dan perkotaan. Tabel ini memperlihatkan proporsi jumlah kecamatan di setiap wilayah yang melaporkan bahwa, berdasarkan indikator ini, keadaan telah memburuk (salah satu dari tiga jawaban yang menunjukkan keadaan lebih buruk). Untuk wilayah-wilayah yang parah terkena dampak krisis berdasarkan indeks “kiat penanggulangan” pada Tabel 1, proporsi yang melaporkan keadaan “lebih buruk” pada indikator ini sangat tinggi, misalnya 93% di perkotaan Aceh, 87.5% di perkotaan Jawa Barat, 82.5% di pedesaan Jawa Barat. Sebaliknya di wilayah-wilayah yang melaporkan paling sedikit terkena dampak dilihat dari indeks “kiat penanggulangan”, hanya sedikit yang melaporkan keadaan yang “lebih buruk” dalam penjualan aset. Misalnya, kecamatan yang melaporkan keadaan penjualan aset “lebih buruk” di wilayah pedesaan Bengkulu hanya 16.7% dan di wilayah pedesaan Maluku hanya 26.1%. Tabel ini juga menunjukkan bahwa kurang dari setengah kecamatan yang melaporkan keadaan penjualan aset

“lebih buruk” di wilayah pedesaan di 12 propinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Timor Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 2. Proporsi jumlah kecamatan di setiap wilayah (propinsi, perkotaan, pedesaan) yang melaporkan keadaan “warga yang menjual aset guna memenuhi kebutuhan pokok” sebagai suatu “kiat penanggulangan” dampak krisis telah memburuk (jawaban 3, 4, atau 5)

| | Total “Lebih Buruk” | Perkotaan “Lebih Buruk” | Pedesaan “Lebih Buruk” |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| DI Aceh | 65.6 | 93.3 | 62.0 |
| Sumatra Utara | 49.2 | 68.6 | 43.8 |
| Sumatra Barat | 52.7 | 75.0 | 43.9 |
| Riau | 37.2 | 61.1 | 30.9 |
| Jambi | 32.2 | 53.9 | 25.5 |
| Sumatera Selatan | 28.4 | 50.0 | 26.6 |
| Bengkulu | 25.8 | 57.1 | 16.7 |
| Lampung | 43.9 | 75.0 | 36.3 |
| Rata-rata | 41.9 | 66.8 | 35.7 |
| Jakarta | 88.4 | 88.4 | |
| Jawa Barat | 83.2 | 87.5 | 82.5 |
| Jawa Tengah | 73.8 | 81.6 | 72.4 |
| DI Yogya | 65.4 | 84.2 | 59.0 |
| Jawa Timur | 76.7 | 86.0 | 75.4 |
| Rata-rata | 77.5 | 85.5 | 72.3 |
| Bali | 56.9 | 66.6 | 53.9 |
| NTB | 72.1 | 77.8 | 71.2 |
| NTT | 54.0 | 73.3 | 51.4 |
| Timtim | 40.3 | 46.2 | 38.7 |
| Kalimantan Barat | 33.6 | 100.0 | 26.7 |
| Kalimantan Tengah | 55.2 | 87.5 | 50.0 |
| Kalimantan Selatan | 70.2 | 84.6 | 68.4 |
| Kalimantan Timur | 71.5 | 85.7 | 66.6 |
| Rata-rata | 56.7 | 77.7 | 53.4 |
| Sulawesi Utara | 28.0 | 35.3 | 26.4 |
| Sulawesi Tengah | 29.0 | 44.4 | 26.6 |
| Sulawesi Selatan | 38.6 | 58.9 | 33.1 |
| Sulawesi Tenggara | 51.6 | 55.5 | 51.0 |
| Maluku | 30.0 | 42.9 | 26.1 |
| Rata-rata | 35.4 | 47.4 | 32.6 |

B. Analisis Tingkat Kabupaten

Dalam analisis ini, pedesaan dan perkotaan dibedakan berdasarkan kabupaten dan kotamadya. Kabupaten dan kotamadya diurutkan menurut indeks-indeks dampak krisis dan dibagi ke dalam lima bagian berdasarkan kuintil. Kemudian dilakukan dua tipe analisis, yaitu analisis visual dengan menggunakan peta dan perbandingan statistik dari proporsi berbagai wilayah yang termasuk ke dalam setiap kuintil.

Peta dampak krisis. Kelima bagian wilayah dipetakan untuk memperlihatkan penyebaran kewilayahan dari dampak krisis. Gambar 1 memperlihatkan peta-peta ini untuk empat indeks: 1a. Kiat penanggulangan, 1b. Ketahanan pangan, 1c. Ketenagakerjaan, dan 1d. Pendidikan.

Gambar 1. Dampak krisis di tingkat kabupaten dalam kiat penanggulangan, ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan pendidikan

Peta-peta ini memperlihatkan gambaran yang sangat jelas, khususnya pada indeks “kiat penanggulangan” (yang terutama ditentukan oleh penjualan aset dan penurunan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan). Pada peta nasional terdapat lima wilayah yang berada pada kuintil paling bawah:

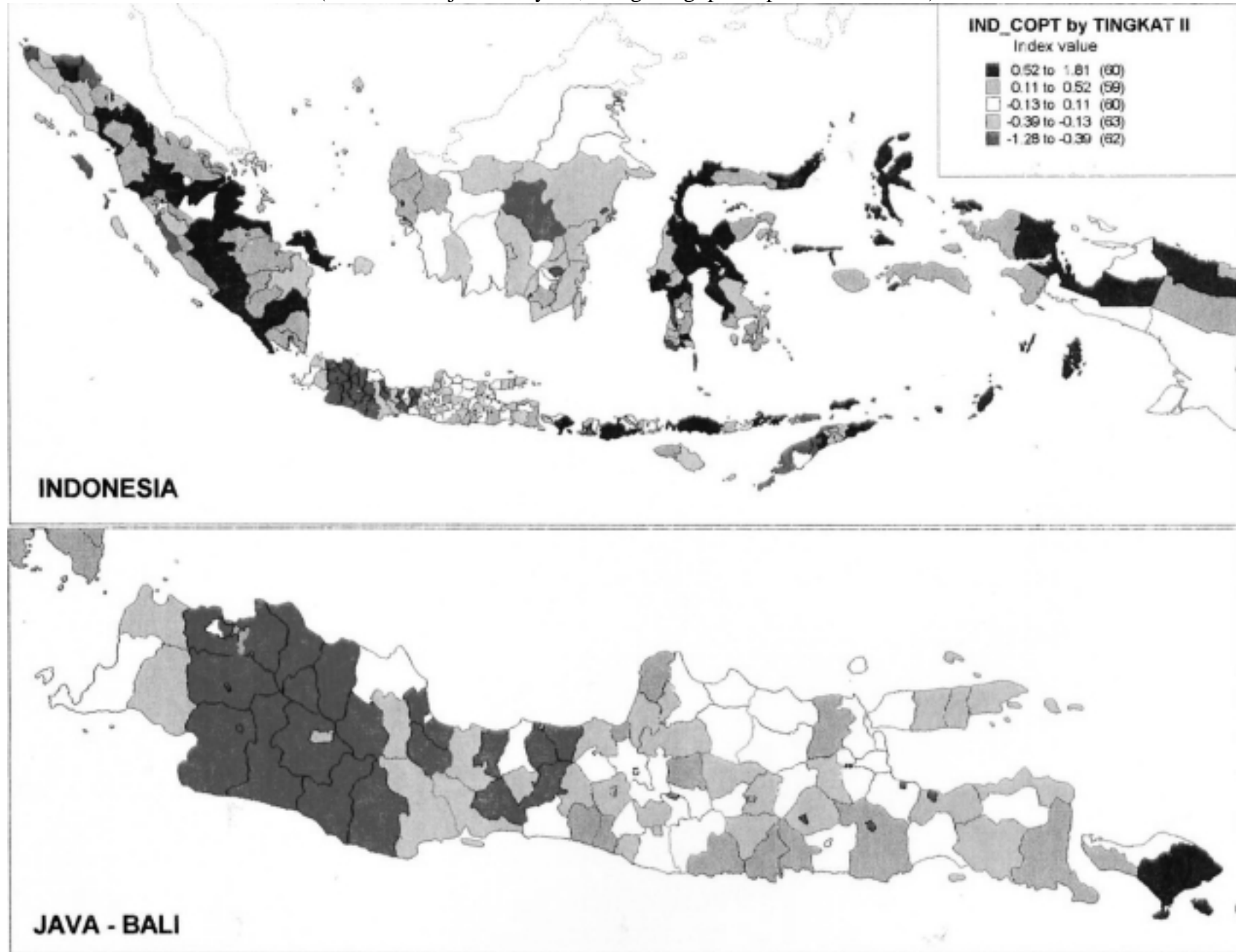
- Jawa Barat dan beberapa bagian dari Jawa Tengah
- Wilayah-wilayah perkotaan (kotamadya-kotamadya tampak sebagai titik-titik gelap di semua pulau, dan terlihat lebih jelas lagi pada peta Jawa-Bali)
- NTT dan beberapa bagian dari Timor Timur
- Beberapa daerah tersebar di bagian barat dan utara Sumatera (Aceh)
- Bagian yang luas (tetapi jarang penduduknya) dari Kalimantan.

Sebaliknya wilayah-wilayah yang warnanya terang, yaitu wilayah-wilayah yang berada pada kuintil paling atas, menunjukkan bahwa:

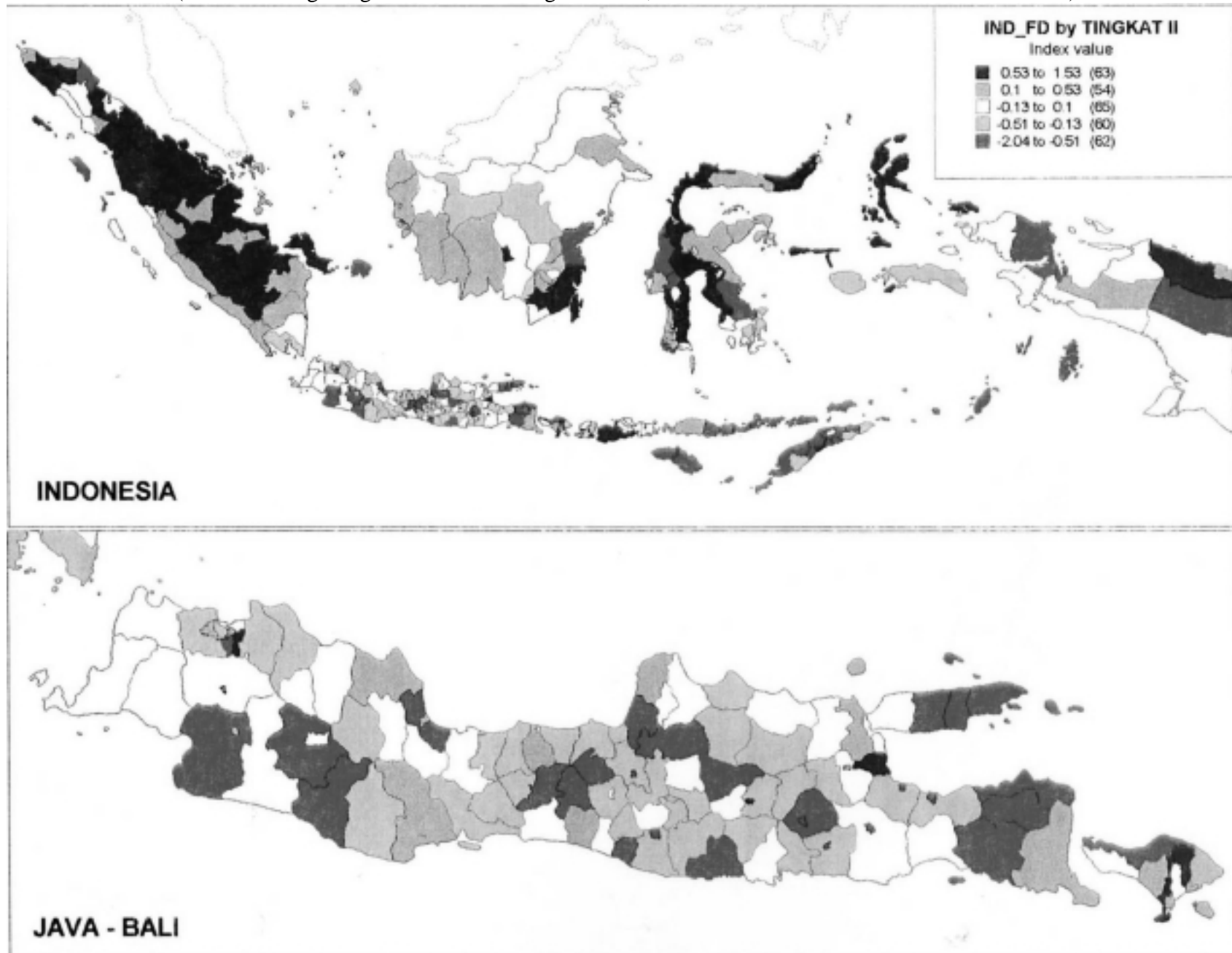
- Sebagian besar dari Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Bali adalah wilayah-wilayah yang paling sedikit terkena dampak krisis.
- Tidak ada satu wilayah pun di Jawa berada di kuintil paling atas atau paling sedikit terkena dampak krisis.

Pola umum yang sama juga muncul dalam indeks-indeks dampak krisis lainnya. Indeks ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa masalah ketenagakerjaan lebih merupakan krisis “pulau Jawa” (dengan lebih banyak wilayah pedesaan yang terkena dampak krisis) dan perkotaan, dengan beberapa perkecualian di Sumatera. Menariknya, salah satu unsur penting dari indeks

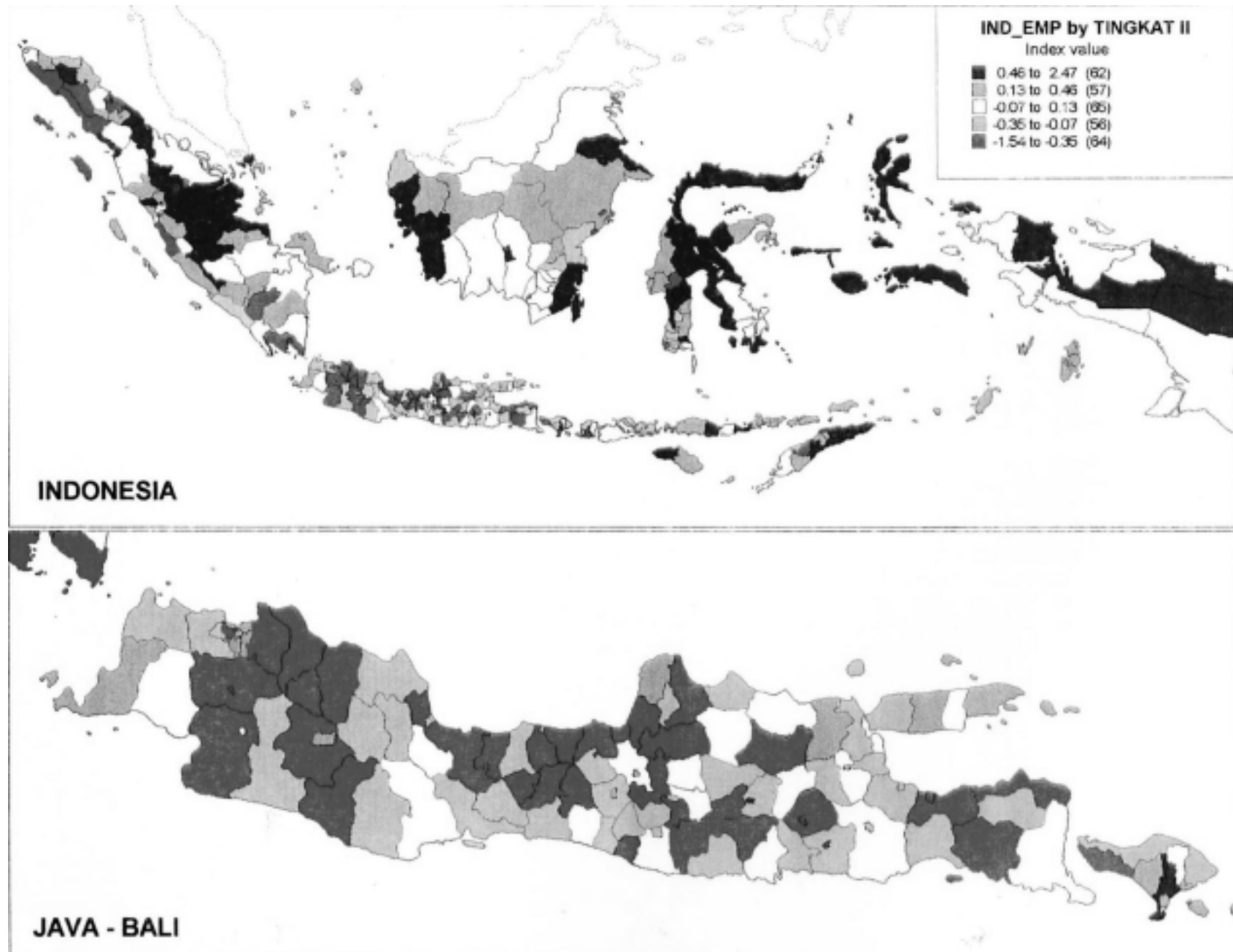
Gambar 1a: Indeks *Perubahan* dalam Penggunaan “Kiat Penanggulangan”
(Contoh: Menjual kekayaan, mengurangi partisipasi dalam arisan)



Gambar 1b: Indeks Perubahan dalam Ketidaktahanan Pangan
(Contoh: Mengurangi frekuensi/keseringan makan, memakan makanan berkualitas lebih rendah)

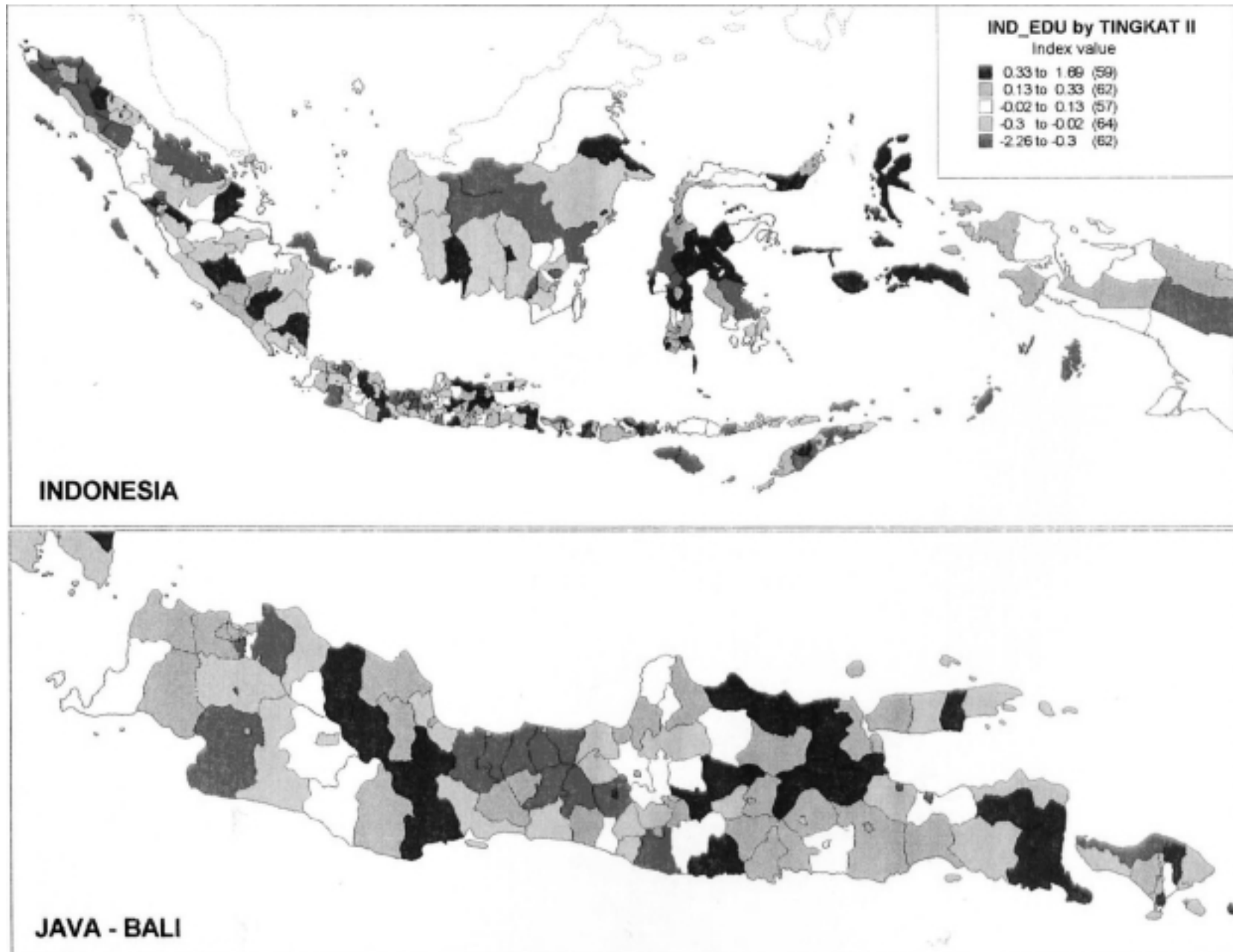


Gambar 1c: Indeks *Perubahan* dalam Kondisi Ketenagakerjaan
(Contoh: Migrasi pulang, semakin banyak anggota keluarga yang bekerja)



Gambar 1d: Indeks *Perubahan* dalam Pendaftaran Pendidikan Primer

(Contoh: 3 sampai 4 putus sekolah / drop-out)



dampak di bidang ketenagakerjaan adalah orang-orang yang “kembali ke desa”. Ini berarti bahwa “pengangguran” dalam arti yang sebenarnya tidaklah diukur dan bahwa daerah-daerah yang ditinggalkan sama-sama terkena dampak yang parah dengan daerah-daerah yang menerima perpindahan penduduk. Ini mungkin alasan mengapa terdapat lebih banyak daerah pedesaan di Jawa dan Bali yang kelihatan terkena dampak yang keras di bidang ketenagakerjaan karena adanya limpahan dari daerah perkotaan Jawa.

Peta ketahanan pangan, yang terutama ditentukan oleh indikator yang berupa memakan makanan yang lebih sedikit dan lebih rendah kualitasnya, juga pada dasarnya merupakan masalah “Jawa dan perkotaan” tetapi dengan beberapa pengecualian. Pertama, dalam indeks ini NTT dan Timor Timur tampak terkena dampak yang jauh lebih parah daripada dalam indeks “kiat penanggulangan” atau “ketenagakerjaan”. Ini menunjukkan dimensi lingkungan alam dari masalah ini. Kedua, beberapa bagian dari Jawa Barat dan khususnya daerah Jabotabek tampak tidak begitu terkena dampak dalam bidang ini, yang tampaknya disebabkan oleh lebih tingginya tingkat pendapatan awal sehingga menjual aset akan lebih banyak dipilih daripada mengurangi makanan sebagai suatu mekanisme penanggulangan dampak krisis. Artinya, karena indeks “ketahanan pangan” mencakup tidak hanya produksi pangan tetapi juga pengurangan makan, maka pengaruh krisis di daerah yang lebih makmur (seperti Jabotabek) akan terlihat lebih jelas dalam penjualan aset, yang merupakan pilihan pertama bagi mereka yang memilikinya, sehingga pengurangan makan hanya akan muncul kemudian.

Analisis statistik. Mengkaji 40% daerah tingkat II (kabupaten dan kotamadya) yang terkena dampak krisis paling parah tampak jelas memperkuat hasil di tingkat propinsi. Kotamadya-kotamadya secara umum lebih terkena dampak daripada kabupaten-kabupaten. Baik untuk indeks kiat penanggulangan maupun ketenagakerjaan, 60% kotamadya termasuk ke dalam 40% daerah tingkat II yang terkena dampak krisis paling parah, sementara hanya 38% dari kabupaten termasuk ke dalam kategori ini. Untuk indeks ketahanan pangan, proporsi kotamadya dan kabupaten yang termasuk ke dalam 40% daerah tingkat II yang terkena krisis paling parah hampir sama, yaitu 41% untuk kabupaten dan 45% untuk kotamadya.

Sekali lagi, seperti halnya di tingkat propinsi, daerah-daerah di pulau Jawa menunjukkan pola yang berbeda. Baik kabupaten-kabupaten maupun kotamadya-kotamadya termasuk ke dalam dua kuintil yang paling parah terkena dampak krisis (lihat peta dimana sebagian besar wilayah di Jawa ditandai dengan warna hitam), khususnya dalam hal kiat penanggulangan dan ketenagakerjaan. Lebih dari itu, indeks kiat penanggulangan di Jawa Barat menunjukkan bahwa 65% dari daerah tingkat II di propinsi ini termasuk ke dalam kuintil yang paling parah terkena dampak krisis, sementara 20% lainnya termasuk ke dalam kuintil kedua terparah. Lima dari

enam kotamadya di propinsi ini termasuk ke dalam kedua kuintil terparah, seperti halnya dengan 85% dari kabupaten yang ada di propinsi ini.⁷ Propinsi-propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, demikian pula halnya dengan D.I. Yogyakarta, juga mengalami pola yang sama.

C. Apakah krisis memukul daerah-daerah termiskin?

Penting untuk diingat bahwa survei kecamatan hanya mengukur perubahan-perubahan dalam tingkat kesejahteraan secara kualitatif. Hasil dari survei ini menunjukkan pergeseran-pergeseran relatif sejak dimulainya krisis, tetapi tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan atau standar hidup absolut saat ini. Satu pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah dampak krisis yang parah terjadi di daerah-daerah yang sejak semula memang miskin, sehingga membuat daerah-daerah ini semakin terpuruk lagi, ataukah dampak krisis ini lebih parah di daerah-daerah yang tadinya relatif lebih makmur. Uji korelasi sederhana antara berbagai indeks dampak krisis dengan tingkat kemiskinan sebelum masa krisis berdasarkan data SUSENAS 1993-1996 di tingkat kecamatan menghasilkan angka korelasi yang sangat kecil yang tidak nyata secara statistik, walaupun jumlah observasi mencapai 3,900.

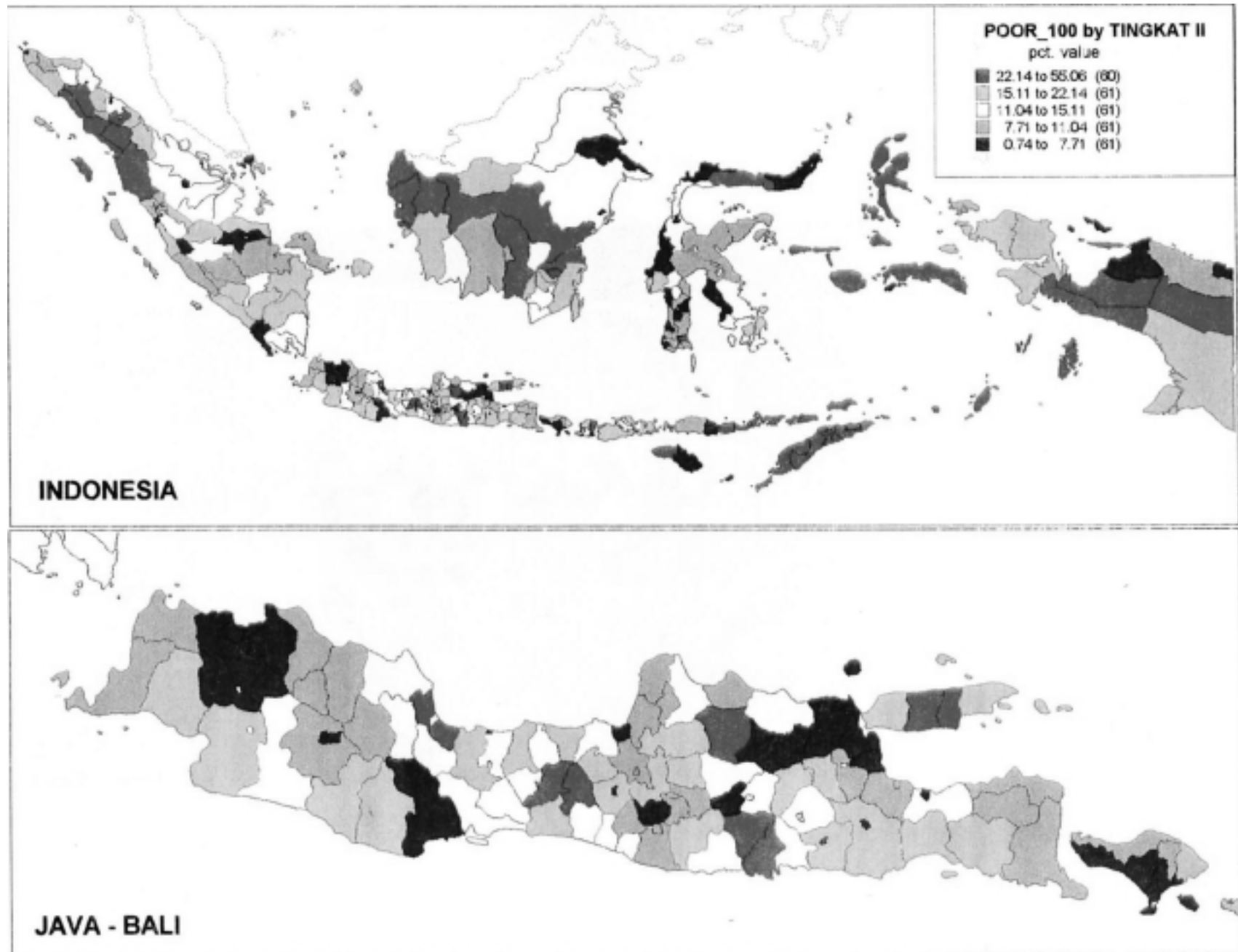
Tidak adanya hubungan antara tingkat kemiskinan sebelum krisis dan besarnya dampak krisis juga dapat dilihat dengan membandingkan gambar-gambar yang memperlihatkan perubahan-perubahan karena krisis dengan tingkat kemiskinan sebelum krisis. Gambar 2 memperlihatkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan standar di setiap kabupaten, yang dihitung berdasarkan data SUSENAS dirata-ratakan dari tahun 1993 sampai dengan 1996. Walaupun sebagian besar Jawa Barat, khususnya daerah-daerah di sekitar Jakarta, memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah, namun dampak krisis sangat besar di daerah ini. Sebaliknya dengan Maluku yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi, mereka bahkan mungkin telah diuntungkan oleh krisis ini.

Gambar 2. Tingkat kemiskinan sebelum krisis (SUSENAS 1993-1996)

Kenyataan bahwa keparahan dampak krisis tidak berhubungan dengan keadaan sebelum krisis menjadikan perancangan instrumen-instrumen untuk mengatasi kemiskinan akibat dampak krisis menjadi sangat rumit karena data kemiskinan sebelum krisis tidak dapat digunakan untuk menentukan sasaran mengatasi dampak krisis. Pertama, beberapa daerah yang semula tidak

⁷ Pola yang sama diperlihatkan oleh indeks ketenagakerjaan.

Gambar 2: Proporsi Populasi Kabupaten dalam Kemiskinan Absolut
(Rata-rata 1993 dan 1996 SUSENAS)



miskin telah mengalami dampak krisis yang relatif parah sehingga sekarang menjadi lebih miskin daripada daerah-daerah lainnya. Kedua, yang lebih rumit lagi adalah bahwa banyak daerah yang tadinya makmur (misalnya Jabotabek) telah terkena dampak krisis yang sangat parah, tetapi belum mencapai tingkat kemiskinan absolut dari daerah-daerah yang memang sejak semula miskin. Dalam hal ini, penyusunan sasaran untuk mengatasi dampak krisis tidak sama dengan penyusunan sasaran untuk mengentaskan kemiskinan. Tentu saja hal ini menimbulkan pertentangan yang cukup tajam antara program-program pembangunan jangka waktu panjang, yang biasanya ditujukan untuk membangun daerah-daerah terpencil dan pedesaan agar dapat mengejar daerah-daerah lain yang lebih maju, dengan program-program krisis dan darurat, yang akan diarahkan pada sasaran-sasaran di daerah-daerah perkotaan dan pedesaan yang sebelum krisis relatif makmur dan berkembang pesat.

Tabel 3 menggambarkan berbagai kombinasi antara dampak krisis dengan tingkat kemiskinan sebelum krisis: relatif makmur dan terkena dampak yang parah (misalnya Jabotabek), relatif miskin dan terkena dampak yang parah (misalnya NTT), relatif miskin dan tidak terkena dampak yang parah (misalnya Maluku), serta relatif makmur dan tidak terkena dampak yang parah (misalnya Bali).

Tabel 3. Contoh-contoh dari dampak krisis yang berbeda-beda

| | Relatif makmur sebelum krisis | Relatif miskin sebelum krisis |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Terkena dampak parah | Jabotabek, Jawa Barat | NTT, Kalimantan Timur |
| Tidak terkena dampak parah | Sulawesi Tengah, Bali | Maluku, Jambi |

IV. Dampak-dampak Khusus dari Krisis

Selain heterogenitas dari keseluruhan dampak krisis juga terdapat terdapat perbedaan-perbedaan antar daerah dalam dimensi-dimesi lain dari krisis ini. Bagi beberapa daerah krisis ini terutama berpengaruh di bidang ekonomi melalui pasar tenaga kerja, sedangkan di daerah-daerah lainnya terdapat krisis ketahanan pangan yang diakibatkan oleh kondisi alam.

Lebih dari itu, masyarakat yang berasal dari berbagai tingkat pendapatan absolut yang berbeda akan bereaksi secara berbeda pula terhadap krisis ini. Misalnya, keluarga kelas menengah mungkin akan bereaksi terhadap menurunnya pendapatan dengan menambah jam kerja, mengurangi konsumsi, mengambil tabungan, dan menjual aset, tetapi kecil kemungkinan sampai mereka mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah dasar atau mengalami kekurangan gizi. Sebaliknya masyarakat yang hidup dekat tingkat kemiskinan absolut tidak memiliki kemewahan untuk menggunakan kiat-kiat penanggulangan seperti itu, sehingga suatu krisis

dapat memaksa mereka untuk membuat anak-anak mereka putus sekolah dasar dan mengurangi makan.

Dengan menguji bagaimana berbagai indeks dampak krisis berbeda antar wilayah memberikan petunjuk mengenai hal tersebut. Hasil dari berbagai indeks menurut wilayah diperlihatkan pada Tabel 4.

| Tabel 4. Perbandingan antar indeks | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Indeks | Lima wilayah yang terkena dampak paling parah | Lima wilayah yang paling sedikit terkena dampak | Jumlah perkotaan dari 20 wilayah yang terkena dampak paling parah | Jumlah perkotaan dari 20 wilayah yang paling sedikit terkena dampak |
| Dampak keseluruhan | Kalimantan Timur (kota) | Bengkulu (kota) | 14 | 7 |
| Ketahanan pangan | Timor Timur (kota) | Bengkulu (kota) | 12 | 9 |
| Kiat penanggulangan | DI Aceh (kota) | Maluku (kota) | 15 | 5 |
| Ketenagakerjaan | Nusa Tenggara Barat (kota) | Maluku (kota) | 13 | 6 |
| Pendidikan | Kalimantan Barat (kota) | Maluku (kota) | 8 | 14 |
| Kesehatan | DI Yogya (kota) | Kalimantan Tengah (kota) | 12 | 11 |

A. Ketahanan pangan

Seperti ditunjukkan pada Tabel 3, dampak krisis dalam hal ketersediaan pangan lebih parah di daerah perkotaan. Sementara itu daerah pedesaan yang terkena paling parah terletak di Jawa dan Indonesia bagian timur. Penemuan ini sesuai dengan temuan sementara dari IFLS2+⁸. Nilai rata-rata dan median pengeluaran riil per kapita di daerah pedesaan meningkat. Sementara itu, di daerah perkotaan nilai rata-rata pengeluaran riil rumah tangga per kapita menurun sekitar 40 persen (tetapi nilai mediannya turun jauh lebih kecil, menunjukkan bahwa sebagian besar penurunan pendapatan terjadi pada kelompok berpendapatan lebih tinggi). Ditambah dengan meningkatnya harga pangan, penduduk perkotaan telah mengalami penurunan daya beli yang tajam.

Di Indonesia bagian timur, masalah ketahanan pangan adalah dampak dari musim kamarau pada tahun sebelumnya. Data lain juga memproyeksikan kekurangan bahan pangan

⁸ Data ini masih sangat sementara. Survei ini mencoba untuk menelusuri sampel rumah tangga yang sama. Pada saat laporan ini ditulis, analisis yang dihasilkan berdasarkan atas 80% dari rumah tangga yang sudah diidentifikasi. Oleh karena yang 20% sisanya yang masih sedang ditelusuri tidak bersifat tipikal, maka sampel yang sudah ada tidak dapat mewakili.

yang parah di Indonesia bagian timur, khususnya jagung, singkong, kentang manis, dan talas (lihat Garcia Garcia dan Sean Foley, Nov. 1997).

Sebagai tambahan, variabel-variabel individu dari survei ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Naiknya harga beras - Tidaklah mengherankan bahwa setengah dari responden menyatakan bahwa harga beras telah meningkat lebih dari 50%. Hal ini sesuai dengan laporan harga-harga yang didapat dari seluruh pelosok negeri. Indeks harga konsumen (IHK) umum dari bulan Mei hingga September 1998 telah meningkat lebih dari 50% dan kenaikan harga beras telah lebih tinggi daripada IHK umum.

Berkurangnya ketersediaan bahan makanan pokok - Nilai rata-rata dari jawaban terhadap pertanyaan mengenai perubahan dalam ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan pokok sejak tahun yang lalu menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tajam dalam ketahanan pangan dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya. Penyebab kelangkaan bahan makanan pokok adalah rusaknya sistem distribusi dan penurunan produksi di daerah-daerah yang terkena musim kemarau panjang.

B. Pekerjaan dan upah

Dampak krisis pada pasar tenaga kerja dan akses ke kegiatan ekonomi lebih parah di daerah perkotaan dan di Jawa (Tabel 1). Empat dari tujuh propinsi di wilayah pedesaan yang terkena dampak paling parah ada di Jawa. Temuan bahwa NTB terkena dampak paling parah dalam hal ketenagakerjaan juga konsisten dengan hasil awal dari IFLS2+, yang menunjukkan bahwa hampir 15% dari laki-laki yang bekerja di tahun 1997 telah kehilangan pekerjaannya pada bulan Agustus 1998 (Rand: Measuring Change in Indonesia, 1998, p. 9). Variabel-variabel individu dari survey menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

Kembalinya pekerja migran laki-laki – Baik kecamatan-kecamatan perkotaan maupun pedesaan melaporkan adanya arus yang lebih besar daripada biasanya dari pekerja laki-laki yang kembali karena kehilangan pekerjaan di tempat lain. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada arus satu arah dari penduduk perkotaan yang kehilangan pekerjaan lalu kembali ke pedesaan ataupun sebaliknya. Sementara itu terdapat kenaikan yang lebih kecil dalam jumlah pekerja perempuan yang kembali ke kecamatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data juga menunjukkan turunnya tingkat migrasi keluar.

Kenaikan upah nominal pertanian dan harga output - Lebih dari 85% *mantri tani* melaporkan bahwa upah mencangkul telah meningkat. Jawaban mereka juga menunjukkan bahwa terdapat kenaikan upah yang lebih kecil untuk pemungutan hasil panen⁹. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi tidak adanya perubahan dalam pendapatan nominal adalah sangat tidak beralasan¹⁰, karena data mengenai perubahan harga-harga menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan upah riil yang cukup besar di banyak daerah. Akan tetapi, pada sisi pendapatan, telah terjadi kenaikan secara cepat pada harga-harga hasil pertanian bukan beras. Jawaban dari para mantri tani juga menunjukkan telah terjadi kenaikan tingkat keuntungan usaha tani (lebih dari 50% menjawab bahwa keuntungan usaha tani telah meningkat dibandingkan dengan tahun yang lalu, walaupun rata-rata jawaban secara keseluruhan adalah tidak ada perubahan). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga output lebih besar daripada kenaikan upah di beberapa daerah.

C Pendidikan

Sebagaimana telah didiskusikan di atas, analisis hasil survei menunjukkan bahwa, berdasarkan indeks-indeks yang telah disusun, daerah perkotaan terkena dampak yang lebih parah daripada daerah pedesaan. Perkecualian ada di indeks pendidikan, dimana 12 dari 20 wilayah yang terkena dampak paling parah adalah wilayah pedesaan. Sebaliknya untuk 20 wilayah yang terkena dampak paling kecil, hanya enam yang merupakan wilayah pedesaan. Walaupun jawaban-jawaban untuk pertanyaan individu menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah cukup rendah, terdapat beberapa persoalan di daerah-daerah pedesaan. Salah satu kemungkinan adalah bahwa kenaikan upah pertanian telah meningkatkan biaya kesempatan (*opportunity cost*) bersekolah di daerah pedesaan, membuat lebih menarik untuk menarik anak keluar dari sekolah. Kemungkinan lainnya adalah bahwa keluarga-keluarga pedesaan hidup “lebih dekat ke batas kemiskinan” sehingga suatu penurunan pendapatan yang secara proporsional sebenarnya sama akan mengakibatkan lebih banyak keluarga pedesaan yang menarik anak-anaknya keluar dari sekolah dibandingkan dengan keluarga perkotaan.

Untuk variabel-variabel individu, semua responden mengindikasikan bahwa menarik anak-anak keluar dari sekolah tingkat dasar bukanlah merupakan reaksi yang umum terhadap

⁹ Data BPS menunjukkan bahwa upah di sektor pertanian meningkat sekitar 30-35% secara rata-rata untuk berbagai tugas, dengan kenaikan berkisar dari 10 sampai 50% di berbagai propinsi.

¹⁰ Suatu publikasi baru-baru ini, misalnya, menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia hampir mendekati 100 juta orang pada tahun 1998, yang diperoleh berdasarkan asumsi bahwa tingkat pendapatan nominal tetap tidak berubah walaupun harga-harga telah melonjak 80%. Hal ini jelas sekali secara analitik tidak memiliki landasan kuat dan secara empirik keliru.

dampak krisis¹¹. Hasil ini lebih diperkuat kembali oleh jawaban-jawaban yang diberikan oleh para penilik sekolah dalam pertanyaan khusus – dimana hampir 85% menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan atau penurunan dalam jumlah murid yang putus sekolah antara kelas 3 dan 4¹². Secara rata-rata, para penilik sekolah juga menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam tingkat putus sekolah secara keseluruhan selama tahun ajaran yang lalu (dibandingkan dengan tahun sebelumnya) atau di dalam jumlah murid perempuan dan laki-laki yang masuk ke kelas 1 pada tahun ini (dibandingkan dengan tahun yang lalu). Akan tetapi, untuk yang belakangan ini, distribusi jawaban condong kepada adanya penurunan dalam tingkat pendaftaran murid kelas 1, yang menunjukkan bahwa para orang tua mungkin menunda masuk sekolah untuk anak-anak yang lebih kecil sementara anak-anak yang lebih besar tetap melanjutkan.

D. Kesehatan

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, dampak krisis di bidang kesehatan hampir sama antara daerah pedesaan dan perkotaan. Dua belas dari 20 wilayah yang terkena dampak paling parah adalah wilayah perkotaan, tetapi 11 dari 20 wilayah yang terkena dampak paling kecil juga wilayah perkotaan. Akan tetapi, indeks kesehatan sesuai dengan indeks-indeks lain dalam hal temuan bahwa Jawa terkena dampak krisis yang sangat parah. Kecuali DKI Jakarta, 4 propinsi lainnya di Jawa termasuk ke dalam 20 propinsi yang terkena dampak paling parah.

Jawaban dari para dokter *puskesmas* menunjukkan bahwa kenaikan harga dan berkurangnya persediaan alat-alat kontrasepsi lebih besar pengaruhnya daripada dampak-dampak lainnya yang dimasukkan ke dalam survei. Distribusi jawaban memberikan indikasi bahwa harga-harga yang meningkat merupakan masalah yang lebih besar daripada ketersediaan.

E. Urutan masalah

Para responden diminta untuk mengurutkan masalah dari yang paling kecil ke yang paling besar dari sebuah daftar yang berisikan 8 potensi masalah. Dari jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini 3 masalah teratas diidentifikasi sebagai “masalah prioritas”. Pola dari jawaban-jawaban yang diberikan menunjukkan bahwa terdapat suatu pendapat yang cukup kuat dan konsisten mengenai apa dampak-dampak krisis yang paling besar. Misalnya, peringkat yang relatif tinggi dari “pengangguran” (terutama di daerah perkotaan), “memperoleh bahan makanan pokok”, dan “kehilangan pendapatan” dibandingkan dengan peringkat yang relatif rendah dari

¹¹ Pertanyaan umum tidak membedakan antara murid-murid sekolah dasar dengan sekolah menengah.

¹² Menurut fakta, tingkat putus sekolah di sekolah dasar yang tertinggi berada di antara kedua tingkat ini. Tidak ada perbedaan dalam jawaban untuk murid perempuan dan laki-laki. Sumber-sumber data lain

dampak pendidikan atau kesehatan (lihat Tabel 5). Secara keseluruhan, hilangnya daya beli riil dari pendapatan, yang merupakan hasil kombinasi dari berkurangnya kesempatan kerja dan naiknya harga-harga bahan makanan pokok, merupakan masalah yang paling utama.

Tabel 5 Urutan prioritas masalah-masalah di tingkat kecamatan

| Masalah | % responden yang menyatakan sebagai masalah prioritas | | |
|--------------------------------|---|----------|-------|
| | Perkotaan | Pedesaan | Total |
| Pengangguran | 6.5 | 20.1 | 27 |
| Memperoleh bahan makanan pokok | 3.6 | 17.0 | 21 |
| Hilangnya pendapatan | 4.5 | 20.0 | 25 |
| Anak-anak putus sekolah | 0.3 | 1.5 | 2 |
| Menurunnya pelayanan kesehatan | 0.3 | 1.4 | 2 |

F. Perbandingan dengan penelitian-penelitian lain

Terdapat tiga survei lain yang memberikan hasil-hasil awal mengenai perbandingan antara keadaan sebelum dan sesudah krisis, yaitu Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (*Indonesia Family Life Survey* atau IFLS) 2+, Survei Seratus Desa (SSD), dan Survei Sekolah. Tidak ada satupun dari ketiga survei ini yang memiliki cakupan nasional sehingga sulit untuk membandingkan hasil ketiganya. Tetapi hasil utama dari survei kecamatan sebagian besar konsisten dengan hasil-hasil awal dari survei-survei lain tersebut.

Perkiraan dari rata-rata pengeluaran di daerah pedesaan dan perkotaan dari IFLS2+ menunjukkan bahwa nilai rata-rata per kapita dari pengeluaran rumah tangga di daerah pedesaan telah meningkat di tahun yang lalu, sedangkan di daerah perkotaan turun hampir 40%. SSD yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa kepemilikan barang-barang tahan lama telah mengalami kenaikan di daerah pedesaan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa daerah perkotaan terkena dampak krisis yang lebih parah daripada daerah pedesaan.

Survei IFLS2+ menunjukkan jumlah murid terdaftar di sekolah dasar telah meningkat untuk murid perempuan dan laki-laki baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, yaitu konsisten dengan temuan bahwa angka putus sekolah tetap sama atau sedikit menurun. Hasil dari survei sekolah yang baru-baru ini dilaksanakan oleh Bank Dunia dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga mengungkapkan jumlah murid terdaftar secara keseluruhan di tingkat sekolah dasar tidak tampak menyimpang dari kecenderungan sebelumnya dan hanya menurun 1.5% pada tahun 1998/99, yang kira-kira sama dengan rata-rata dari empat tahun sebelumnya. Survei ini juga menunjukkan bahwa daerah perkotaan di Jawa Tengah, daerah perkotaan di Maluku, dan

menunjukkan bahwa masalah putus sekolah berada di tingkat sekolah menengah pertama sehingga data dari survei ini tidak memberikan banyak sumbangan dalam hal ini.

Jakarta mengalami penurunan jumlah murid terdaftar yang cukup berarti pada tingkat sekolah menengah pertama, sedangkan di daerah pedesaan Sulawesi Selatan terdapat kenaikan sebesar 8%.

V. Kesimpulan dan Saran-saran

Tentu saja survei ini mengkonfirmasi sesuatu yang telah jelas, yaitu bahwa penduduk Indonesia mengalami dampak sosial yang sangat besar dari suatu krisis ekonomi dan keuangan yang parah. Tetapi yang baru adalah bukti empirik di tingkat nasional yang menunjukkan bahwa dampak krisis tersebut sangat heterogen baik antara wilayah perkotaan dengan pedesaan maupun antar daerah. Beberapa daerah telah terkena dampak yang parah, beberapa daerah lainnya relatif tidak begitu terkena dampak yang besar, dan beberapa daerah lainnya bahkan mengalami perbaikan.

Urutan wilayah perkotaan dan pedesaan menurut berbagai indeks dampak krisis menunjukkan bahwa, secara umum, **dampak krisis yang dialami oleh wilayah perkotaan adalah lebih parah**. Untuk empat dari lima indeks yang digunakan, proporsi wilayah perkotaan dalam 20 wilayah yang terkena dampak yang paling parah jauh lebih tinggi daripada wilayah pedesaan (12-15 dari 20). Demikian juga, proporsi wilayah pedesaan dalam 20 wilayah yang terkena dampak paling kecil lebih tinggi untuk indeks-indeks ketahanan pangan, kiat penanggulangan, dan ketenagakerjaan (11-15 dari 20).

Pola kedua adalah bahwa **baik wilayah perkotaan maupun pedesaan di Jawa telah terkena dampak krisis yang parah**. *Semua* wilayah di Jawa berada dalam urutan 20 (dari 51) wilayah yang terkena dampak krisis paling parah untuk indeks keseluruhan (dan termasuk atau mendekati 20 wilayah yang terkena paling parah untuk indeks-indeks lainnya). Wilayah-wilayah lain yang secara konsisten selalu berada dalam urutan tertinggi wilayah yang terkena dampak krisis adalah wilayah-wilayah perkotaan di **Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, DI Aceh, Lampung, NTB, NTT dan Timor Timur**.

Sebaliknya, beberapa propinsi tampak hanya mengalami dampak yang relatif kecil dari krisis keuangan ini baik untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan mereka. Khususnya Sumatera Utara, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Maluku termasuk ke dalam kategori ini. Sebagai tambahan, wilayah-wilayah pedesaan di Sulawesi Selatan, Jambi, dan Riau juga secara konsisten berada dalam 20 wilayah yang terkena dampak paling kecil.

Merancang program yang secara khusus ditujukan untuk menjawab krisis ini adalah rumit dan harus menyeimbangkan beberapa tujuan. Tetapi data dari survei ini sekurang-kurangnya menunjukkan bahwa usaha-usaha penanggulangan dampak krisis secara umum harus

diarahkan ke wilayah-wilayah perkotaan dan secara khusus ke daerah-daerah yang mengalami penurunan terbesar dalam tingkat kesejahteraan, seperti wilayah-wilayah perkotaan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, DI Aceh, Lampung, NTB, NTT, dan Timor Timur. Di Jawa, baik wilayah pedesaan maupun perkotaan harus dimasukkan ke dalam program-program penanggulangan krisis.

Penting untuk dicatat bahwa **besarnya dampak krisis tidak ada hubungannya dengan tingkat kemiskinan sebelum krisis**. Hasil ini menunjukkan perlunya menguji ulang data dan asumsi-asumsi mengenai penyebaran kemiskinan. Walaupun sulit untuk dipraktekkan, terdapat perbedaan analitik antara menentukan sasaran penanggulangan dampak krisis dengan menentukan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan jangka panjang. Dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan jangka panjang terdapat suatu pertanyaan yang lebih mendalam, dan perlu dipecahkan terlebih dahulu, mengenai apakah krisis ini telah mengubah dinamika dasar dan oleh karenanya memerlukan suatu pemikiran kembali dari program-program pengentasan kemiskinan yang ada ataukah krisis ini hanya merupakan goncangan sementara saja.

Dalam hal jenis-jenis intervensi yang perlu dirancang untuk menanggulangi dampak krisis, hal ini memerlukan analisis yang lebih rinci mengenai keefektifan dan keefisienan *dalam praktek* dari berbagai jenis intervensi. Tetapi tampaknya terdapat kebutuhan bagi usaha-usaha yang terus-menerus untuk menyalurkan beras dan bahan-bahan pokok lainnya ke daerah-daerah yang memerlukan, program-program padat karya di daerah-daerah perkotaan, usaha-usaha untuk mempertahankan pelayanan kesehatan, penyediaan alat-alat kontrasepsi secara gratis atau yang disubsidi, dan keberlanjutan dari program bea siswa.

Konsistensi dari hasil-hasil survei ini dengan survei-survei lain juga menunjukkan bahwa instrumen kualitatif dengan pengumpulan data yang cepat seperti survei ini dapat memberikan gambaran yang baik mengenai derajat dampak krisis di berbagai daerah yang berbeda dan kecenderungan-kecenderungan dari perubahan secara keseluruhan. Walaupun hasil yang diperoleh memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat digunakan merancang program-program penanggulangan dampak krisis, survei seperti ini dapat memberikan arah yang benar kepada usaha-usaha penanggulangan krisis. Karena biayanya kecil dan pengumpulan datanya cepat, survei sejenis dapat diulang kembali setelah enam bulan sebagai suatu usaha untuk menyediakan pemantauan berkelanjutan dari dampak krisis yang melanda seluruh pelosok Indonesia.

Lampiran 1: Rancangan dan pelaksanaan survei

Kuesioner untuk survei ini disebarakan di tingkat kecamatan melalui jaringan mantri statistik dari Biro Pusat Statistik (BPS). Mantri statistik ada di hampir setiap kecamatan dan tanggungjawab mereka termasuk memelihara dan mengumpulkan data terbaru mengenai penduduk, pendidikan, dan data lokal lainnya. Kuesioner dikirimkan ke kantor BPS di tingkat kabupaten, di mana mantri statistik dari setiap kecamatan kemudian mengambilnya bersama-sama dengan petunjuk pelaksanaan survei dan mengembalikannya dalam waktu satu minggu. Kuesioner-kuesioner yang telah terisi lengkap dikirimkan kembali ke kantor pusat BPS di mana dilakukan pemasukan dan pengolahan data. Keseluruhan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan survei ini (termasuk administrasi survei dan pengolahan data) sekitar satu bulan. Analisis hasil survei memerlukan waktu lebih dari tiga minggu.

Di daerah pedesaan, tiga responden dari survei ini adalah:

- **mantri tani** -- sebagai perwakilan Departemen Pertanian di tingkat kecamatan, mantri tani mengawasi semua penyuluh pertanian dan, melalui mereka, mengumpulkan laporan mengenai produksi pertanian, luas lahan yang ditanami, dan teknologi pertanian yang digunakan di seluruh kecamatan.
- **dokter puskesmas** - dokter puskesmas adalah pimpinan dari pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan dan menerima pasien dari seluruh pelosok kecamatan. Sebagian dokter puskesmas juga melakukan kunjungan rutin ke sarana-sarana penunjang pelayanan kesehatan di bawah tingkat kecamatan.
- **penilik sekolah** - penilik, atau pengawas sekolah, bertemu secara teratur dengan kepala-kepala sekolah dan guru-guru dari seluruh kecamatan.

Di daerah perkotaan, mantri tani digantikan oleh Kepala Seksi PMD (Pembangunan Masyarakat Desa), yang bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan. Dalam petunjuk yang menyertai kuesioner, para responden diminta untuk berkonsultasi dengan rekan-rekannya (misalnya penyuluh pertanian, perawat dan bidan, dan kepala sekolah/guru-guru) sebelum melengkapi kuesioner dengan tujuan untuk menjamin agar jawaban-jawaban yang diberikan mewakili kecamatan secara keseluruhan.

Lampiran 2: Reliabilitas antar responden

Walaupun jawaban dari responden yang berbeda di kecamatan yang sama mungkin tidak akan pernah benar-benar sama, keragaman di dalam kecamatan yang relatif besar dibandingkan dengan keragaman antar kecamatan akan menunjukkan besarnya gangguan (*noise*), sebagai kebalikan dari tanda-tanda (*signal*), dari pola jawaban yang diperoleh, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan indikator-indikator ringkasan di tingkat kecamatan.

Untuk dapat membandingkan nilai-nilai dari berbagai gejala yang diukur, perlu diketahui sampai dimana derajat kesamaan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh ketiga kelompok responden. Pengujian reliabilitas internal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) menguji tingkat korelasi antara ketiga responden untuk setiap pertanyaan umum;
- b) memisahkan keragaman total ke dalam antar responden dan antar kecamatan; dan
- c) melakukan analisis terhadap perbedaan-perbedaan yang sistematis dalam kecenderungan pemusatan (*central tendency*) di antara ketiga responden.

Hasil dari beragam ukuran uji reliabilitas internal ini disajikan pada **Tabel 6, Tabel 7, dan Tabel 8**. **Tabel 6** memperlihatkan koefisien korelasi dari ketiga jenis responden untuk setiap pertanyaan umum (kecuali untuk pertanyaan no.15). **Tabel 7** menerapkan analisis sidik ragam satu arah untuk memisahkan antara sumbangan keragaman di dalam dan antar kecamatan dari keragaman total. **Tabel 8** menunjukkan rata-rata penyimpangan jawaban di dalam kecamatan, yaitu jumlah dari perbedaan absolut dari jawaban-jawaban di dalam kecamatan dibagi dengan jumlah total kecamatan.

Lampiran 3: Analisis komponen-komponen pokok (principal components analysis)

Lampiran 4 menyajikan daftar semua variabel yang dimasukkan ke dalam survei ini dan Tabel-tabel 8a-e menunjukkan variabel-variabel yang digunakan dalam penyusunan setiap indeks dampak krisis. Perlu dicatat bahwa karena relatif banyaknya jawaban yang kosong dari pertanyaan-pertanyaan kuantitatif, variabel-variabel tersebut dikeluarkan dari penyusunan indeks.

Lima indeks yang disusun adalah: indeks ketersediaan/keterjangkauan pangan (IND_FD); indeks dampak di bidang ketenagakerjaan (IND_EMP); indeks dampak di bidang pendidikan (IND_EDU); indeks dampak di bidang kesehatan (IND_HLT); dan indeks dampak terhadap masyarakat dan kiat penanggulangan (IND_COPT).

Tabel 9a-9e menunjukkan hasil dari analisis komponen-komponen pokok, dan Tabel 10 menunjukkan matriks korelasi di antara kelima indeks. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel-tabel ini, tiga indeks yang terbaik adalah IND_FD, IND_COPT, dan IND_EMP. Variabel-variabel dalam ketersediaan/keterjangkauan pangan menggambarkan dengan jelas banyaknya yang mengalami kesulitan dalam membeli bahan makanan pokok secara mencukupi. Variabel-variabel dalam kiat penanggulangan menggambarkan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat dan perorangan (misalnya penurunan dalam partisipasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan penjualan barang-barang rumah tangga).

**REPUBLIC OF INDONESIA
STATISTIC CENTER BUREAU**

**QUESTIONS LIST
ECONOMIC CRISIS IMPACT SURVEY
ON KECAMATAN LEVEL**

QUESTIONNAIRE FOR PUSKESMAS DOCTORS

CONFIDENTIAL

| I. IDENTITY OF RESPONDENT | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| 101. | Province | <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| 102. | Regency/City | <input style="width: 50px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| 103. | Kecamatan | <input style="width: 80px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| 104. | Name of Respondent: | |
| | Title : | |
| 105. | Signature/Institution Stamp | |
| 106. | Telephone : | <input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> |
| 107. | Sample Number : | <input style="width: 30px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> |

| II. INFORMATION ON OFFICIAL | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | Description | Census Taker | Corrector |
| 201. | Name of Official | | |
| 202. | NIP | | |
| 203. | Date of Census | | |
| 204. | Signature | | |
| 205. | Signature/Stamp | | |

GUIDE FOR QUESTIONNAIRE COMPLETION CRISIS IMPACT MONITORING SURVEY ON KECAMATAN LEVEL

1. Aims

This survey aims to recognize the respondent's perception about various crisis impacts occurred in the kecamatan area. Therefore, respondents are expected to understand the situation. Specifically, this survey is expected to produce information about crisis impact on health and birth control problem, education, migration and unemployment, agriculture, and social problems.

2. Discussion with Associates

Each respondent should have working scope in one kecamatan so that he has sufficient knowledge about general condition in the area. Nevertheless, to have a good description about the condition in the kecamatan, before completing this questionnaire, respondents should discuss with their associates. For instance, a doctor of Public Medical Center should have a discussion with PPLKB, PLKB, and nurses. The answers given then will represent the collective answers of several people in the institution. In addition to that, the answers should be based on changes caused by economic crisis and not frequent changes, which happen all year.

3. Guide for Questionnaire Completion

Questions given in this questionnaire are dedicated to institutions that have a kecamatan level working scope. The answers given in the questionnaire should be able to describe respondent's perception about general condition occurred in the kecamatan as a result of the crisis.

Although alternatives of answers given are qualitative, hereby we present an answer scale to some questions given, as a guide for respondents in answering the questions. Answer scale presented in this questionnaire constitutes levels of respondent's perception towards a comparison between the situation today and situation in the previous year (1997), by a range of percentage fluctuation. The questions with answer scale are:

**QUESTIONS LIST
ECONOMIC CRISIS IMPACT SURVEY
ON KECAMATAN LEVEL**

Mark with a Cross (X) for the Answers of Questions about Current General Condition in Kecamatan According to Your Perception

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|-------------------------|--------------------|---------------|-----------|------|
| 1. | Number of <i>male</i> inhabitant returned to the kecamatan in January-August `98 for the reason of losing jobs elsewhere (compare with January-August `97 period) | Very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | Less |
| 2. | Number of <i>female</i> inhabitant returned to the kecamatan in January-August `98 for the reason of losing jobs elsewhere (compare with January-August `97 period) | Very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less |
| 3. | Number of <i>male</i> inhabitant went to other kecamatan in January-August `98 for the reason of seeking jobs (compare with January-August `97 period) | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less |
| 4. | Number of <i>female</i> inhabitant went to other kecamatan in January-August `98 for the reason of seeking jobs (compare with January-August `97 period) | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less |
| 5. | Number of inhabitant changing principal food with other low quality food (gadung, cattle food, etc.) in January-August `98 compared with January-August `97 period) | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less |
| 6. | Number of inhabitant doing more fields of work and or work longer at the moment compared with those in August 1997 | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less |
| 7. | Number of inhabitant selling their valuable possessions (jewelry, cattle, TV) to support daily basically needs in January-August `98 compared with those in January-August `97 period | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less |
| 8. | Number of inhabitant quitting saving-clubs for the reason of unaffordability in January-August `98 compared with January-August `97 period | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less |
| 9. | Amount of saving-club collection at the moment compared with that of August `97 | very much decrease | much decrease | decrease | no effect | more |
| 10. | Level of traditional/religious ceremony such as selamatan/party/kenduri in January-August 1998 | very much decrease | much decrease | decrease | no effect | more |
| 11. | Working contribution (gotong royong) for ceremonies of selamatan/kenduri/parties in January-August 1998 compared with January-August 1997 period | very much decrease | much decrease | decrease | no effect | more |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---------------|----------------|--------------|-------------|
| 12. | Principal food (rice, corn) stock in stores compared with that in August `97 | very much decrease | much decrease | decrease | no effect | more |
| 13. | Number of inhabitant that can no longer afford purchasing principal food (rice, corn) in January-August `98 compared with January-August `97 period | very much increase | much increase | increase | no effect | less |
| 14. | Number of theft in January-August `98 compared with January-August `97 | very much increase | much increase | increase | no effect | less |
| 15. | Indicate level of seriousness of questions 1 to 8 by writing down numbers in brackets provided (1 = the most Serious, 2 = secondly serious, 3= thirdly serious, etc.) | | | | | |
| | - Unemployment | | | | () | |
| | - Difficulty of having principal food | | | | () | |
| | - Drop-out students | | | | () | |
| | - Income decrease | | | | () | |
| | -Theft/crime | | | | () | |
| | - Harvest failure | | | | () | |
| | - Worse medical care | | | | () | |
| | - Starvation | | | | () | |
| | Others (if any) | | | | () | |
| | - | | | | () | |
| | - | | | | () | |
| 16. | Here is some possibilities of ways people use to deal with today's economic crisis. Mark with a cross (X) on the most appropriate answer regarding to peoples custom in the kecamatan. | | | | | |
| | 1. Changing principal food with lower quality one | most likely to do | usually do | not usually do | seldom do it | never do it |
| | 2. Reducing frequency of eating | most likely to do | usually do | not usually do | seldom do it | never do it |
| | 3. Lowering quality of food | most likely to do | usually do | not usually do | seldom do it | never do it |
| | 4. Selling cattle's | most likely to do | usually do | not usually do | seldom do it | never do it |
| | 5. Selling valuable possessions | most likely to do | usually do | not usually do | seldom do it | never do it |
| | 6. Stop joining saving-clubs | most likely to do | usually do | not usually do | seldom do it | never do it |

| No. | Range | Note |
|--------|---|---|
| 16-19. | - | Clear |
| 20. | Increase more than 50% Increase between 25% - 50% Increase between 5% - 25% Increase or decrease less than 5% Decrease less than 5% | very much more expensive much more expensive more expensive no effect Cheaper |
| 21. | Increase more than 50% Increase between 25% - 50% Increase between 5% - 25% Increase or decrease less than 5% Increase more than 5% | very much more numerous much more numerous more numerous no effect Less |
| 22. | Increase more than 50% Increase between 25% - 50% Increase between 5% - 25% Increase or decrease less than 5% Increase more than 5% | very much more numerous much more numerous more numerous no effect Less |
| 23. | Decrease more than 50% Decrease between 25% - 50% Decrease between 5% - 25% Increase or decrease less than 5% Increase more than 5% | very much decrease much decrease Decrease no effect Increase (more) |
| 24. | Increase more than 50% Increase between 25% - 50% Increase between 5% - 25% Increase or decrease less than 5% Decrease less than 5% | very much more expensive much more expensive more expensive no effect Cheaper |
| 25. | - | Clear |
| 26. | - | Children under 12 years old whose nutrition level is below Ministry of Health's standard |
| 27. | - | Birth control service, hospital rest service, medical treatment, roentgen, etc. |
| 28-29. | - | Clear |
| 30-35. | - | Clear |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | 7. Telling their children to quit school | most likely to do | usually do | not usually do | Seldom done | never done |
| | 8. Asking more member of the family to work | most likely to do | usually do | not usually do | Seldom done | never done |
| | 9. Reducing frequency of traditional/religious ceremony | most likely to do | usually do | not usually do | Seldom done | never done |
| | 10. Reducing the amount contributed for traditional/religious ceremony | most likely to do | usually do | not usually do | Seldom done | never done |
| 17. | In the last year, is a special program, for instance the one which is able to employ many, and also low-priced bazaars being held to help people? | | | | Yes | No |
| 18. | If the answer of the previous question was "Yes", name one of the widely known programs? | | | | | |
| 19. | Does the program bring advantages to people? | very advantageous | Advantageous | less advantageous | | |
| 20. | The price of middle quality rice at the moment, compared with that in August '97: | very much more expensive | much more expensive | more expensive | no effect | Cheaper |
| 21. | Number of stores closed down at the moment, compared with the previous year: | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less numerous |
| 22. | Number of visits to Public Medical Center in June-August '98 period compared with June-August '97 period: | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less numerous |
| 23. | Number of visits to one of the biggest private hospitals/clinics in June-August '98 period compared with June-August '97 period: | very much more decrease | much more decrease | more decrease | no effect | increase |
| 24. | Average price of birth control device at the moment compared with that in August '97: | very much more expensive | much more expensive | more expensive | no effect | cheaper |
| 25. | Availability of birth control device at Public Medical Center at the moment compared with that in August '97: | very much insufficient | very insufficient | insufficient | no effect | more sufficient |
| 26. | Number of children (<12 years old) which suffer from malnutrition at the moment compared with that in August '97: | very much more numerous | much more numerous | more numerous | no effect | less numerous |
| 27. | Variety of medical care by Public Medical Service compared with that in August '97: | very much more decrease | much more decrease | more decrease | no effect | better |
| 28. | Availability of medication and other health device at Public Medical center at the moment compared with that in August '97 | Very much more insufficient | very much insufficient | Very insufficient | no effect | better |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------|
| 29. | Ability to pay for medication at the moment compared with that in August '97" | Very much more insufficient | very much insufficient | Very insufficient | no effect | better |
| 30. | Number of patients went to Public Medical center in the kecamatan in June-August 1998 and June-August 1997 | June-August '98 | | | | |
| | | June-August '97 | | | | |
| 31. | Number of patients went to one of the biggest private hospitals/clinics in the kecamatan in June-August 1998 and June-August 1997 | June-August '98 | | | | |
| | | June-August '97 | | | | |
| 32. | Number of children under 12 years old who suffered from malnutrition on January-August '98 period and on January-August '97 period | January-August '98 | | | | |
| | | January-August '97 | | | | |
| 33. | Number of birth control program participants who switched to other birth control method for the reason of funding on January-August '98 and January-August '97 period | January-August '98 | | | | |
| | | January-August '97 | | | | |
| 34. | Price of birth control device which is most often used in the kecamatan on August '98 and '97 (Rp./unit) | August '98 | | | | |
| | | August '97 | | | | |
| 35. | Price of generic medication (paracetamol) in the kecamatan on August '98 and '97) (Rp./unit) | August '98 | | | | |
| | | August '97 | | | | |

Signature and Institution Stamp

Date, Month, Year